

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Konflik

Menurut Webster (1966) , istilah “*conflict*” di dalam bahasa aslinya berarti “suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain” Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri²⁷.

Menurut Soerjono Soekanto, konflik mempunyai beberapa bentuk khusus yaitu²⁸:

- 1) Pertentangan Pribadi, yaitu pertentangan yang terjadi apabila dua orang sejak pertama tidak saling menyukai dan berkembang menjadi saling memusuhi serta menghancurkan.
- 2) Pertentangan rasial, yaitu pertentangan yang bersumber dari perbedaan ciri-ciri badaniah, kepentingan dan kebudayaan.
- 3) Pertentangan antar kelas-kelas sosial yang disebabkan karena perbedaan kepentingan.
- 4) Pertentangan politik yaitu pertentangan politik antar golongan dalam masyarakat.

²⁷ Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), 9.

²⁸ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:CV Rajawali,1982), 97-98.

- a) Frustasi/kegagalan/perasaan gagal
- b) Oposisi/sikap menentang, bersifat laten/tersembunyi dan dapat bersifat overt/ terang-terangan. Konflik laten terjadi dalam hal agama, golongan petani, organisasi. Konflik laten akan menjadi overt, apabila menjelma pada permusuhan/perselisihan.

Pada dasarnya Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx. Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, dimana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan.

³⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik#cite_note-1 (diakses 9 September 2014)

Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Selain itu, Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu supaya terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, didalamnya teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power.

Karl Marx berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik yang terstruktur antara berbagai individu dan Kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi. sampai pada titik tertentu dalam evolusi kehidupan sosial manusia, hubungan pribadi dalam produksi mulai menggantikan pemilihan komunal atas kekuatan-kekuatan produksi. Dengan demikian masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki kekuatan-kekuatan menjadi kelas sosial. Jadi kelas dominan menjalin hubungan dengan kelas-kelas yang ter subordinasi dalam

Marx di atas memandang eksistensi hubungan pribadi dalam produksi dan distribusi barang sebagai elemen kunci dalam banyak masyarakat. Ia juga berpendapat bahwa pertentangan antara kelas dominan dan kelas tertertindas memainkan peranan sentral dalam menciptakan banyak perubahan penting perubahan sosial. Sebenarnya sebagaimana yang telah diungkapkan, sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga kini adalah pertentangan-pertentangan kelas³¹.

Berikutnya Dahrendorf mengemukakan teori konfliknya mengenai pembahasan tentang wewenang dan posisi yang merupakan fakta sosial. Menurut Dahrendorf distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa terduga menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perwujudan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat.

han sosial. Sebenarnya
ari semua masyarakat ya
ntangan kelas³¹.
dorf mengemukakan

akan konflik sosial secara sistematis
dari adanya berbagai posisi dan

posisi bawah dalam setiap struktur. Karena setiap individu yang tidak tunduk terhadap

³¹ Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, SH., SE., MM. *Sosiologi dan Konsep Teori* (Jakarta: PT Refika Aditama, 2009), 125.

³² Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 145.

Pertentangan itu terjadi dalam situasi dimana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Pertentangan kepentingan ini selalu ada setiap waktu dan dalam setiap struktur. Karena itu kekuasaan yang sah selalu berada dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti status quo. Kepentingan yang terdapat dalam satu golongan tertentu selalu dinilai objektif oleh golongan yang bersangkutan dan selalu berdempetan dengan posisi individu yang termasuk ke dalam golongan itu.

³³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* Cetakan Pertama (Jakarta: Rajawali, 1985), 31.

terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. sedangkan kelompok kedua yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semua yang lebih luas³⁴.

Kelompok kepentingan ini memiliki struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan ini yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat; kemudian terdapat mata rantai antara konflik dan perubahan sosial, konflik ini memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik golongan yang terlihat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal, begitu pula jika konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan lebih efektif.

Mengenai penalaran teori konflik ini dijelaskan oleh Karel J. Veeger sebagai berikut³⁵:

1. Kedudukan orang dalam kelompok tidaklah sama, karena ada pihak yang berkuasa dan berwenang, dan ada pula pihak yang tergantung.
2. Perbedaan dalam kedudukan menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berbeda pula. Yang satu hendak berhasil dalam kedudukannya yang tinggi, mempertahankannya, memakai kesempatan-kesempatan khusus yang berkaitan dengan jabatannya, mengontrol arus informasi, dan mampu membalas jasa-jasa dari mereka yang setia agar mereka lebih setia. Pihak yang satu ini cenderung mengarah kepada konservatisme.

34 *ibid*

³⁵ Karel J. Veeger, *Pengantar Sosiologi : Buku panduan Mahasiswa*, (Jakarta : Gramedia pustaka utama, 1992), 93-95.

2.2 Konsep Antagonisme

Bagi kaum Marxis, antagonisme politik adalah juga pada hakikatnya bersifat ekonomis, akan tetapi mereka lebih tergantung pada sistem produksi daripada

³⁷ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, 157.

Seperti yang kita tahu bahwa kasus Dolly menimbulkan sejumlah pertentangan yang mana pertentangan yang timbul tersebut berasal dari dua pihak yang berbeda kepentingan (Pemerintah vs Masyarakat). Kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda sehingga munculah pertentangan antar dua paham. Hal ini berkaitan dengan konsep Antagonisme politik, yang membahas mengenai pertentangan antara dua paham yang berbeda sehingga konsep ini diperlukan sebagai pisau analisa bagi pembahasan yang penulis angkat yakni tentang “Antagonisme Antar Aktor dalam Pembubaran Prostitusi Dolly”.

Istilah ekonomi politik diambil dari khazanah bahasa Yunani, *polis* yang berarti sebuah kota atau sebuah unit politik dan *oikonomike* yang maknanya mengacu pada manajemen suatu rumah tangga. Kombinasi kedua kata tersebut menunjukkan betapa erat keterkaitan antara fakta-fakta produksi, keuangan dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal dan komersial³⁹.

³⁹ Lane, Jan Erik, *Ekonomi Politik Komparatif*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 1994), xi.

tujuan yang berbeda; yang pertama adalah menciptakan suatu sumber pendapatan atau swasembada bagi masyarakat, atau membantu mereka dalam mencari pendapatan dan mengupayakan swasembada; dan yang kedua adalah menyediakan sejumlah daya bagi negara atau pemerintah agar mampu menjalankan berbagai tugas atau fungsinya dengan baik. Ilmu tersebut berusaha merumuskan cara bagaimana memperkaya rakyat sekaligus pemerintah⁴⁰.

Ketika istilah “ekonomi politik” dihadirkan kembali saat ini guna mendampingi istilah baku “ilmu ekonomi”, fokusnya tidak lagi pada fenomena-fenomena ekonomi secara umum, melainkan secara lebih spesifik ia menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik. Berdasarkan hasil surveynya terhadap kepustakaan ekonomi politik yang tengah bangkit kembali itu, Martin Staniland dalam bukunya yang berjudul *What is Political Economy* menguraikan bidang-bidang yang menjadi bahan kajian ekonomi politik⁴¹. Menurutnya Kriteria identifikasi bahwa suatu teori merupakan teori ekonomi politik hanya didasarkan pada ada-tidaknya uraian tentang interaksi sistematis antara aspek ekonomi dan politik di dalam teori tersebut. Hubungan interaksi itu bisa dinyatakan dalam banyak cara misalnya sebagai hubungan kausalitas antara suatu proses dengan proses lainnya (ini dijelaskan dalam teori-teori deterministik), sebagai hubungan timbal-balik atau resiprositas (ini merupakan substansi teori interaktif), atau sebagai suatu proses perilaku yang berlangsung terus menerus. Sebenarnya ada tidaknya label “ekonomi politik” pada suatu jenis teori,

⁴⁰ Lane, Jan Erik, *Ekonomi Politik Komparatif*, XIV.

41 Ibid.

merupakan persoalan nomor dua; yang lebih penting adalah, kemampuannya memberi penjelasan empiris⁴².

Namun dalam pengembangan berikutnya, istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Anda bisa mengetahui perkembangan makna konsep ekonomi politik dengan membandingkan definisi yang diuraikan dalam *Palgrave Dictionary of Political Economy* tahun 1899, dan yang dijelaskan dalam *New Palgrave Dictionary of Economics* terbitan tahun 1987. Yang pertama berbunyi : Semula, ekonomi politik adalah, sesuai dengan namanya, mengacu pada perpaduan dua seni, yakni seni pengelolaan “perekonomian pada umumnya” dan seni pengaturan pemerintahan⁴³.

Ekonomi politik, cabang ilmu sosial yang kemudian berkembang menjadi ekonomi, menitikberatkan pada peningkatan pendapatan Negara dan peningkatan sumber daya Negara. Istilah ekonomi politik mulai digunakan secara umum pada abad ke delapan belas dan bermakna cara-cara yang digunakan pemerintah untuk mengatur perdagangan, pertukaran, uang dan pajak (secara umum apa yang sekarang disebut kebijakan ekonomi).

Mosco mengartikan istilah ekonomi politik secara sempit sebagai: studi tentang hubungan-hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumber-sumber produksi, distribusi dan konsumsi, termasuk didalamnya sumber-sumber yang terkait dengan komunikasi. Boyd

⁴² Ibid.

43 Ibid.

diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan apa keuntungan serta kerugian yang ditimbulkan oleh cara suatu keputusan politik tertentu dilakukan. Meskipun terkadang metodologi yang digunakan sering tidak jelas⁴⁷.

Menurut Dwight Y.King mengenai pendekatan Ekonomi Politik ialah sebagai alat analisis yang menitikberatkan kepada kekuasaan politik sebagai variable dominan. Pengamatannya banyak tertuju pada segi-segi politik yang mengubah aspek-aspek ekonomi⁴⁸. Ekonomi politik juga merupakan studi dan penyelidikan atas aspek-aspek proses ekonomi yang terwujud dalam teori-teori ekonomi dan politik yang teoritis, namun ia bukan sekedar sejarah ekonomi belaka, ataupun ekonomi deskriptif saja. Dalam implementasinya, ekonomi politik mempelajari proses proses ekonomi konkret dan atau terapan yang dapat diimplementasikan pada waktu-waktu tertentu dan situasi maupun kondisi tertentu. Ekonomi politik tidak semata-mata mempelajari perumusan ekonomi deskriptif secara kuantitatif berupa statistik ekonomi ataupun studi tentang pembagian ekonomi deskriptif dalam bentuk geografi ekonomi dan konvensional⁴⁹.

Disebutkan oleh Charles Lindblom bahwa dasar dari Ekonomi politik adalah pasar, kekuasaan Negara dan persuasi. Walaupun ia tidak menunjukkan bagaimana proses hubungan antara ketiga hal tersebut, hal ini mempengaruhi dinamika dari ketiga kelas sosial. Secara teoritis dikemukakan hubungan antara Negara, pengelasan dan hubungan ekonomi dalam tiga bentuk , yaitu :

- a) Negara memiliki kekuatan yang mengatur dan mengontrol dinamika sosial.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional 2-Implementasi Konsep dan Teori*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007),2.

49 Ibid., 116.

(market), sedangkan dalam versi ekonomi politik sosialis tekanan diberikan pada kekuasaan (power) ⁵¹.

Kerumitan lain dalam membandingkan ekonomi politik baru dengan ekonomi politik sosialis ialah karena dalam ekonomi politik sosialis asumsi-asumsi dan logika kerja ekonomi tidak mudah diakomodasikan. Masalahnya, ekonomi politik baru didasarkan pada asumsi kebebasan memilih individu, sedangkan dalam perspektif sosialis hampir segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh kekuasaan⁵².

Beberapa ciri pokok yang melandasi argumentasi tentang ekonomi politik dapat dilihat dari sifat-sifatnya dan pemahaman terhadap adanya interaksi maupun tingkah laku timbal balik antara faktor-faktor ekonomis dan faktor-faktor kekuasaan (power) Negara / pemerintah (state) yang mempengaruhi hasil aktivitas ekonomi dengan pasarnya. Respon pasar dan berikut umpan balik yang mewakili kepentingan masyarakat yakni berkenaan dengan cara menentukan sifat-sifat dan distribusi hak-hak milik, objek dari Negara dan pasar itu sendiri maupun ketentuan yang mengatur perilaku mekanisme ekonomi lainnya, merupakan output yang dihasilkan⁵³.

Studi ekonomi politik secara metodologis sebagaimana tersebut diatas umumnya menempatkan Negara-negara menjadi aktor formal, karena dalam proses politiknya lebih banyak mempengaruhi bagaimana persoalan ekonomi seperti produksi dan distribusi kekayaan mengalir secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

⁵¹ Ibid., 15.

52 Ibid.

⁵³ Ibid., 26.

2.3.2 Ekonomi Politik Perburuan Rente

Perburuan rente merupakan fenomena yang sering dijumpai di negara-negara berkembang yang proses ekonominya relatif dipengaruhi oleh proses politik. Ekonomi dan bisnis dalam masyarakat rente semacam itu diwarnai upaya mendapatkan legitimasi non ekonomi (izin lisensi tunggal). Fenomena perburuan rente inilah yang mempunyai andil berkembangnya bisnis yang tak efisien sehingga rakyat terbebani oleh kerugian publik⁵⁴.

Dalam pengertian netral, rente dimaksudkan sebagai sewa atas penggunaan faktor produksi (gedung, tanah). Atas pengorbanan berupa tenaga kerja, seorang pekerja mendapat upah. Atas pengorbanan penggunaan kapital, pemilik, pemilik tanah akan mendapatkan bunga. Sedangkan atas penggunaan tanahnya, pemilik tanah akan mendapatkan imbalan berupa bunga sewa (rente). Dari ketiga imbalan tersebut rente dianggap sebagai perolehan yang paling mudah dan tanpa resiko diantara dua yang lainnya.

Sejalan dengan pengertian rente sebagai imbalan yang tidak berisiko dan paling mudah, maka rente dalam analisis ekonomi politik dimaksudkan sebagai sifat pelaku bisnis untuk memudahkan cara memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal yang menjadi hak milik publik bagi kepentingannya sendiri. Dalam ekonomi klasik, rente merupakan perolehan yang wajar dan sah sebagaimana pelaku ekonomi lain (tenaga kerja, pemilik kapital) juga mendapatkan imbalan atas penggunaan faktor produksinya.

⁵⁴ Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), 20.

Namun dalam ekonomi politik, pengertian rente menjadi negatif karena rente merupakan bentuk sangat mudahnya seseorang atau suatu bisnis mendapatkan keuntungan yang dinikmati oleh sekelompok orang karena mereka mendapatkan kemudahan dari proteksi atau privilege yang diberikan oleh pemerintah (publik). Kemudahan itu muncul karena diberikan oleh pihak yang berkuasa untuk menentukan atau berkat kegigihan dari pengusaha untuk berburu hak dari pemerintah⁵⁵.

Rente dalam perekonomian dapat muncul terutama ketika pemerintah (atas nama publik) memberikan hak – hak tertentu kepada satu atau sekelompok orang dalam berbisnis. Karena berbagai pertimbangan yang diperdebatkan sebagai publik dan melibatkan tarik menarik kepentingan dalam masyarakat, pemerintah memberikan hak tertentu pada suatu pihak untuk menjalankan usahanya. Dari lisensi yang diberikan itulah, pemegang lisensi akan mendapatkan berbagai keistimewaan dan kemudahan dalam berbisnis. Dengan demikian, ia mendapatkan rente yang tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Berbagai bentuk tindakan pemerintah yang bisa memunculkan rente ekonomi dapat berbentuk pemberian lisensi dan pemberlakuan proteksi.

Dalam beberapa kasus adanya intervensi pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dimasyarakat menimbulkan keuntungan rente bagi kelompok-kelompok tertentu. Bagaimanapun, jika *rent seeking* memberikan hasil pengembalian keuntungan yang lebih besar dibandingkan dalam kegiatan ekonomi produktif lainnya. Masyarakat selanjutnya akan berusaha untuk selalu

⁵⁵ Ibid., 21.

2.3.3 Negara vs Pasar

Negara-bangsa selama beberapa abad ini juga memiliki fungsi kontrol terhadap ekonomi. Negara juga menerapkan kebijakan ekonomi tertentu didalam territorial kekuasaannya. Negara memiliki aparat-aparat moneter, kepabeanan dan fiskal.

⁵⁸ Ibid., 43-46.

Itulah perbedaan yang ditemukan dalam perdebatan antara Negara dan pasar. Pasar mempercayai mekanisme alamiah dalam mencapai kesejahteraan, tetapi beberapa perancang Negara percaya bahwa tanggungjawab Negara untuk mencapai kemakmuran adalah legitimasi intervensi atas tindakan intervensi.

Hayek mengajukan gagasan bahwa keunggulan kapitalisme pasar bebas bermula dari interaksi yang berjalan secara alamiah. Mekanismenya adalah dengan membiarkan individu-individu dalam masyarakat memberikan respon secara individual terhadap harga pasar yang terbentuk secara bebas. Alokasi modal yang muncul, kemudian inovasi dan kreativitas manusia dengan sendirinya akan terbentuk. Ketersediaan tenaga kerja dan berlangsungnya roda ekonomi yang tercipta dengan mekanisme yang seperti ini dikatakannya tidak mungkin ditiru oleh perencanaan negara. Kualitas keteraturan ekonomi yang dihasilkan oleh pasar adalah lebih baik daripada perencanaan sentralistik manapun. Sedangkan basis bagi keteraturan ekonomi itu bukanlah berasal dari intervensi Negara. Hayek lebih mempercayai peran penting individu⁶⁰.

⁵⁹ Ibid., 50.

⁶⁰ Ibid., 49-50.

- a) Bahwa setiap komoditas yang diproduksi tentu ada yang membutuhkannya. Prinsip ini hendak mengatakan bahwa berapapun barang yang diproduksi oleh pengusaha, pasti tidak akan sisa oleh karena masyarakat pasti akan menggunakan produk tersebut.
- b) Harga setiap komoditas itu bersifat fleksibel. Dengan demikian keseimbangan akan selalu terjadi. Seandainya terjadi ketidakseimbangan pasar, hal itu hanya bersifat sementara karena untuk selanjutnya keadaan tersebut akan kembali dalam kondisi seimbang (ekuilibrium).

⁶² Prof. Dr. Budi Winarno, MA, *Pertarungan Negara vs Pasar*, 50.

Marx dipengaruhi oleh tiga hukum ekonomi yang tidak dapat dihindari, antara lain⁶⁴ :

- a) Hukum Pertama, hukum disproportionalitas, Ekonomi kapitalis memiliki kecenderungan untuk memproduksi suatu barang tertentu secara berlebihan. Kontradiksi inheren muncul dalam kapitalisme antara kapasitas untuk memproduksi barang dan kapasitas konsumen selaku penerima upah untuk berbelanja barang. Secara konstan terjadi disproportionalitas antara produksi dan konsumsi dalam pasar yang 'anarki' yang menyebabkan depresi periodik dan fluktuasi ekonomi.
- b) Hukum kedua, hukum konsentrasi (akumulasi) kapital. Kompetisi memaksa kapitalis untuk meningkatkan efisiensi dan investasi kapital mereka atau terancam tersingkir dari persaingan. Sebagai hasilnya, evolusi dari kapitalisme adalah untuk meningkatkan konsentrasi kekayaan di tangan beberapa orang yang melakukan efisiensi itu, sedangkan di sisi lain yang banyak melibatkan jumlah orang terjadi gelombang kemiskinan yang sangat besar.
- c) Hukum ketiga, hukum jatuhnya keuntungan. Ketika kapital terakumulasi dan terkumpul tingkat pengembalian menurun yang menyebabkan terjadinya penurunan insentif. Ekonom liberal klasik juga menyadari kemungkinan ini dan percaya bahwa solusi yang tepat adalah dengan mengeksport capital dan barang-barang manufaktur serta mengimpor makanan murah. Kecenderungan menurunnya keuntungan

⁶⁴ Ibid., 58-59.

Menurut sebuah aliran pemikiran, faktor terpenting dalam pembuatan kebijakan adalah pertimbangan ekonomi. Semakin tinggi tingkat kelimpahan suatu negara (lebih dari sekedar makmur), maka akan semakin besar anggaran belanja pemerintahannya sehingga memperbesar sisi penawaran yang dibarengi dengan peningkatan kebijakan publik; dalam kondisi seperti itu, sumber daya yang disediakan untuk membuat kebijakan pasti sangat besar; inilah yang disebut sebagai Hukum Wagner. Tapi itu tidak berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara akan semakin besar sektor publiknya, karena pemilahan porsi sektor publik dan sektor swasta di Negara-negara makmur ternyata tidak sama dengan Negara – Negara berkembang. Khusus berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi, nampaknya Hukum Wagner tidak berlaku, mengingat pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan ekspansi sektor publik. Hipotesis ekonomi mengenai variasi belanja pemerintah biasa berfokus pada faktor-faktor penawaran atau permintaan. Beberapa diantaranya menekankan pentingnya variabel-variabel ekonomi khusus misalnya keterbukaan ekonomi⁶⁸.

⁶⁸ Jane Erik Lane dan Svante Erson, *Ekonomi Politik Komparatif: Demokratisasi dan pertumbuhan benarkah kontradiktif*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2002), 254.

Pada dasarnya karakteristik kebijakan publik bersifat mengarahkan, mengkoreksi dan melengkapi yang bertujuan untuk mengarahkan segala mekanisme pasar. Untuk mencapai efisiensi pasar, perlu adanya informasi lengkap mengenai pasar yang diperlukan produsen dan konsumen sehingga pemerintah diperlukan untuk menjamin kelengkapan informasi. Adanya peraturan pemerintah diperlukan untuk mengkoreksi penyimpangan yang terjadi kondisi persaingan tidak efisien. Peran pemerintah juga diperlukan untuk mengawasi pertukaran barang dan jasa karena hal tersebut memerlukan proteksi untuk melindungi pelaku pasar.

1. Adanya risiko yang sangat besar yang tidak mungkin di kelola swasta.
2. Adanya sifat monopoli dalam usaha tertentu sehingga pemerintah harus campur tangan agar tidak merugikan pelaku ekonomi.

[illegible]

